

# ASEAN



## LAWAN COVID-19

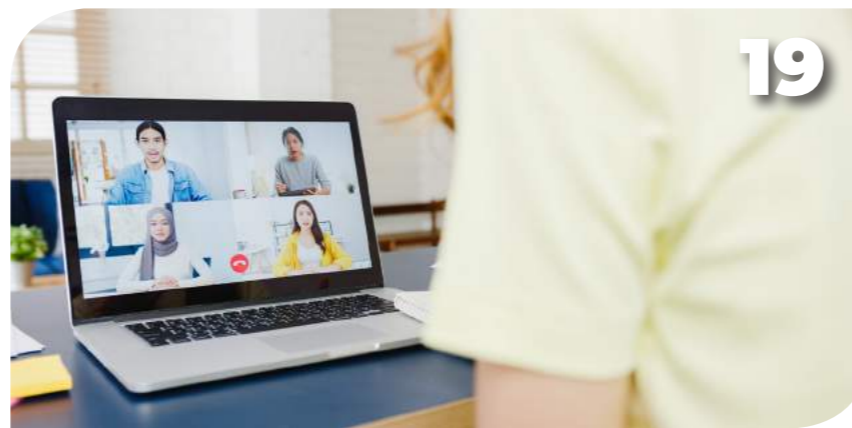
**15** ASEAN DAN PANDEMI COVID

**31** ASEAN TWIPLMACY DURING THE PANDEMIC

**36** BUSANA TIGA KERAJAAN ASIA TENGGARA



11



19



19



31



36

## DAFTAR ISI

### PERSPEKTIF

Kerja Sama Ekonomi ASEAN di Masa Pandemi | 04

### LAPORAN UTAMA

Para Pemimpin ASEAN Bahas Isu Penting di KTT ASEAN Ke-36 | 08

Para Pemimpin ASEAN Berkomitmen Melawan COVID-19 | 11

### LAPORAN KHUSUS

ASEAN dan Pandemi COVID-19 | 15

### REPORTASE

Sosialisasi Penanganan COVID-19 di ASEAN Melalui Webinar | 19

### OPINI

Are We Listening? ASEAN's Response to the Covid-19 Impact on Women and Girls | 24

Women, War, and Peace | 27

### POJOK PSA

ASEAN Twiplomacy During the Pandemic | 31

### POJOK BAHASA

Bahasa Filipina | 34

### SERBA SERBI

Mengenal Busana Tiga Kerajaan di Asia Tenggara | 36

### GALERI FOTO | 40

### INFOGRAFIS | 42

### PENANGGUNG JAWAB

Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN

### REDAKTUR

Sekretaris Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN

### PENYUNTING/EDITOR

Rahmat Azhari  
Avi Dewani Harahap  
Thalita Evani Hindarto

### DESAIN GRAFIS/FOTOGRAFER

Aswandi  
Syarifah Nadya Mahdini

### SEKRETARIAT

Mulyanto  
Heriyadi Setiawan  
Iman Heri Patwono  
Sasi Harianti  
Khusnul Khatimah  
Yangyang

### PEMBUAT ARTIKEL

Janita Jaya  
Rizky Anugerah Putra  
Annisya Khairati  
Ahmad Fahriza  
Anggraeni Widiastuti  
Nanda Tri A. Harahap  
Adfikri Kevin Marvel  
Salma Putri Rianti  
Ika Permata Sari  
Sabrina  
Yusuf Firmansyah  
Primadiana Sari

### ALAMAT REDAKSI

Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN  
Kementerian Luar Negeri  
Jl. Taman Pejambon No.6,  
Jakarta Pusat  
Telp. 021 - 3509050 / 3509059  
Fax. 021 - 3509050

# KERJA SAMA EKONOMI ASEAN DI MASA PANDEMI

Berlianto P.H. Situngkir,  
Direktur Kerja Sama  
Ekonomi ASEAN

**Pandemi COVID-19 telah menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. Hingga kini, jumlah kasus yang tercatat telah lebih dari 25 juta, dengan korban mencapai ratusan ribu jiwa.**

**D**unia terus bekerja keras untuk menekan pertumbuhan kasus sambil berupaya mempercepat pengembangan vaksin untuk mengatasi krisis kesehatan tersebut, termasuk Indonesia. Langkah-langkah preventif telah dilakukan oleh pemerintah negara-negara di dunia di antaranya melalui tes massal, penerapan protokol kesehatan, hingga karantina wilayah.

Sejalan dengan hal tersebut, permasalahan ekonomi yang muncul juga menjadi tantangan besar bagi pemerintah di seluruh dunia. Setelah mampu mencatat pertumbuhan yang relatif stabil

dengan rerata di atas 5 persen dalam dua dekade terakhir, perekonomian ASEAN diuji dengan hantaman pandemi yang berdampak langsung terhadap sektor riil.

Sebagaimana yang terjadi di seluruh dunia, kontraksi ekonomi cukup sulit dihindarkan. Bahkan beberapa negara ASEAN telah resmi memasuki resesi pada kuartal dua 2020, seperti Singapura dan Filipina. Pertumbuhan ekonomi ASEAN diperkirakan akan terkontraksi sebesar 2,7 persen pada 2020.

Sektor pariwisata adalah salah satu sektor yang merasakan dampak

langsung pandemi. Sektor yang pada 2018 menyumbang lebih dari 40 juta lapangan kerja dan 12,6 persen perekonomian ASEAN tersebut, mendadak turun signifikan akibat kebijakan pembatasan perjalanan dan penutupan wilayah. Mobilitas masyarakat yang melakukan perjalanan turun drastis, terutama yang menggunakan transportasi udara.

Di sisi lain, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang selama ini dikenal sebagai tulang punggung perekonomian ASEAN juga mengalami tekanan yang cukup berat. Kontribusi UMKM pada PDB negara-negara anggota ASEAN mencapai 30-53 persen. Sedangkan penyerapan tenaga kerja oleh UMKM berada sekitar 52-97 persen. Penurunan permintaan hingga potensi permasalahan dari sisi input produksi membuat UMKM secara umum harus terus berinovasi untuk bertahan melewati masa sulit ini.

Sebagai kawasan ekonomi yang terintegrasi, ASEAN sendiri berupaya untuk terus meningkatkan

partisipasinya dalam rantai pasok global. Pada 2018, persentase ekspor ASEAN yang merupakan bagian dalam rantai pasok global mencapai 60,9 persen. Gangguan pada aktivitas ekonomi akibat pandemi berpotensi menghambat kelancaran kegiatan produksi khususnya kegiatan industri yang melibatkan struktur alur produksi di banyak negara atau merupakan bagian dari rantai pasok global.

## RESPON PEMERINTAH NEGARA-NEGARA ASEAN

Dalam memitigasi dampak ekonomi yang terjadi, pemerintah setiap negara juga telah mengeluarkan kebijakan domestik, baik kebijakan moneter maupun stimulus fiskal. Sejak awal 2020, mayoritas anggota ASEAN telah menurunkan tingkat suku bunga dan mengimplementasikan kebijakan sektor keuangan lainnya, sesuai dengan pendekatan masing-masing negara. Upaya-upaya tersebut diambil untuk memastikan likuiditas dan stabilitas keuangan terjaga, serta menurunkan biaya pinjaman untuk memacu kegiatan produksi dunia usaha dan konsumsi masyarakat.

Dari sisi kebijakan fiskal, mayoritas pemerintah negara-negara ASEAN juga telah menyiapkan paket stimulus untuk menangani dampak pandemi COVID-19. Secara keseluruhan, nilai paket stimulus tersebut mencapai US\$ 318,2 miliar atau sekitar 10,1 persen dari PDB ASEAN 2019. Pemerintah Indonesia sendiri telah mengalokasikan dana sebesar Rp 641,17 Triliun (US\$ 43 miliar). Selain untuk sektor kesehatan, paket stimulus tersebut umumnya diarahkan dalam bentuk subsidi untuk masyarakat, pemotongan kewajiban pajak kepada dunia usaha, hingga pembiayaan dan restrukturisasi pinjaman. Stimulus tersebut menjadi sangat penting dan mendesak, khususnya bagi UMKM yang memiliki keterbatasan modal dan sumber daya untuk dapat bertahan.

## UPAYA ASEAN DALAM MENDORONG PEMULIHAN EKONOMI

Negara-negara ASEAN memiliki keterkaitan ekonomi relatif signifikan. Tercatat pada 2019, total perdagangan barang intra-ASEAN mencapai US\$ 632 miliar atau 22,4 persen total



perdagangan ASEAN. Dari sisi investasi, total investasi intra-ASEAN mencapai USD 22,3 miliar atau 14 persen dari total investasi langsung asing (Foreign Direct Investment) ke ASEAN. Sedangkan dalam konteks rantai pasok regional, persentase ekspor ASEAN yang merupakan bagian dari rantai pasok regional mencapai 15 persen.

Melihat eratnya hubungan tersebut, koordinasi dan kerja sama antar negara anggota ASEAN memiliki peran penting dalam mitigasi dampak, serta mempercepat proses pemulihan ekonomi kawasan. ASEAN sendiri telah beberapa kali melakukan pertemuan, mulai dari tingkat menteri hingga kepala negara. Beberapa pertemuan juga melibatkan mitra wicara ASEAN, di antaranya Amerika Serikat, Australia, Jepang, Korea Selatan, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Rusia dan mitra lainnya.

Pada The Special ASEAN Summit on COVID-19 yang dilaksanakan tanggal 14 April 2020, Para Kepala Negara di ASEAN menunjukkan komitmennya bekerja sama dalam mengatasi pandemi dengan menghasilkan dokumen

Declaration of the Special ASEAN Summit on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Menyangkut aspek ekonomi, para kepala negara sepakat untuk mengambil langkah bersama dalam mitigasi dampak pandemi. Di antaranya dengan menjaga kepercayaan dan stabilitas ekonomi regional melalui stimulus kepada dunia usaha yang terdampak COVID-19, khususnya UMKM dan kelompok rentan lainnya; menjaga tetap terbukanya pasar ASEAN untuk perdagangan dan investasi; serta memperkuat ketahanan dan keberlanjutan rantai pasok regional, khususnya pangan, komoditas, obat-obatan, alat kesehatan dan barang-barang esensial.

Pada kesempatan yang sama, diadakan pula The Special ASEAN Summit Plus Three on COVID-19. Pada pertemuan tersebut, Para Kepala Negara berkomitmen untuk memastikan ketahanan pangan di kawasan melalui mekanisme ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR) dan meningkatkan kerja sama dan koordinasi regional dengan mendukung ASEAN Plus Three Macroeconomic Research Office

(AMRO) untuk melakukan upaya pengawasan perkembangan ekonomi, serta mekanisme Chiang Mai Initiative Multilateralisation (CMIM) sebagai jaring pengaman keuangan di kawasan. Kesepakatan ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR) ditandatangani oleh Para Menteri Pertanian dan Kehutanan dari 13 negara "ASEAN Plus Three" pada 7 Oktober 2011 di Jakarta. APTERR didirikan untuk mengelola cadangan beras bersama untuk keperluan darurat. Namun demikian, mekanisme kerja sama tersebut mempunyai misi yang lebih luas dalam menangani masalah pangan. Mekanisme kerja sama tersebut menjadi sangat relevan untuk mengantisipasi permasalahan ketersediaan pangan yang muncul akibat adanya pandemi saat ini.

Sedangkan CMIM merupakan multilateral swap arrangement yang berfungsi sebagai jaring pengaman keuangan regional. Dengan total dana yang dikelola hingga US\$ 240 miliar, CMIM dapat menjadi mekanisme pengamanan untuk mengantisipasi kesulitan pada neraca pembayaran dan likuiditas jangka pendek. Melalui

mekanisme kerja sama tersebut, ASEAN Plus Three dapat menjaga kestabilan ekonomi di kawasan, serta mengantisipasi potensi timbulnya krisis.

Pada 36th ASEAN Summit, 26 Juni 2020, Presiden Indonesia, Joko Widodo, menyampaikan bahwa saat ini dunia, termasuk ASEAN, sedang menghadapi dua tantangan besar, yakni mitigasi pandemi COVID-19 serta dampaknya dalam aspek sosial-ekonomi. Untuk itu, Presiden kembali menekankan pentingnya bagi ASEAN untuk mempercepat kerja sama dalam mempercepat pemulihan ekonomi. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Indonesia mengajak organisasi kawasan ini untuk mendiskusikan pembentukan *ASEAN Travel Corridor Arrangement* yang mengedepankan prinsip-prinsip kehati-hatian, terukur dan bertahap.

Pada pertemuan tersebut, para kepala negara juga menyambut baik diadopsinya dokumen Hanoi Plan of Action on Strengthening ASEAN Economic Cooperation and Supply Chain Connectivity in Response to the COVID-19 Pandemic oleh Para Menteri Ekonomi ASEAN. Dokumen tersebut merupakan tindak lanjut implementasi dari Declaration of the Special ASEAN Summit on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Rencana Aksi tersebut mencakup upaya-upaya ASEAN di antaranya untuk memastikan kelancaran arus barang esensial, memperkuat konektivitas rantai pasok, hingga meningkatkan penggunaan teknologi, khususnya bagi UMKM untuk meningkatkan partisipasinya dalam ekonomi digital.

Pemanfaatan teknologi bagi UMKM semakin relevan untuk dapat tetap beroperasi di tengah pandemi, serta meningkatkan produktivitas, memperluas akses pasar, hingga mencari alternatif pembiayaan. ASEAN sendiri saat ini telah memiliki ASEAN Strategic Action Plan for SME Development 2016-2025 di mana salah satu sasaran strategisnya adalah mempromosikan produktivitas, teknologi dan inovasi. Melalui Pertemuan ASEAN Coordinating Committee on MSME dan pertemuan



Sumber: ASEAN.org



Kementerian Perdagangan RI menghadiri The Special ASEAN Economic Ministers' (AEM) Virtual Conference Meeting on COVID-19 Responses yang membahas upaya bersama ASEAN dalam menghadapi pandemi COVID-19 di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta (4/6)

Sumber: Humas Kemendag

badan sektoral lainnya yang terkait, ASEAN dengan mitra wicara secara rutin bekerja sama dalam pengembangan kapasitas bagi UMKM di Kawasan untuk meningkatkan partisipasi dalam ekonomi digital.

Penyelesaian ratifikasi ASEAN Agreement on E-Commerce, yang menjadikan ASEAN sebagai kawasan pertama di dunia yang memiliki perjanjian *e-commerce*, diharapkan dapat mendorong perkembangan ekonomi digital di kawasan. Penandatanganan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), yang ditargetkan pada akhir 2020, juga dapat menjadi instrumen baru dalam mendorong kerja sama ekonomi yang lebih intensif. Pada perayaan ulang tahun ASEAN

ke-53 tanggal 8 Agustus 2020, lembaga ini mengambil tema *A Cohesive Journey towards Recovery*. Tema ini menjadi pengingat bagi negara-negara anggota ASEAN untuk terus bekerja sama sebagai satu kesatuan untuk dapat pulih dari dampak pandemi, sambil terus berupaya meningkatkan integrasi ekonomi di Kawasan.

Pada bulan yang sama, Indonesia juga memperingati hari kemerdekaan ke-75 dengan tema Indonesia Maju. Indonesia dan ASEAN akan terus bekerja sama untuk meningkatkan stabilitas serta memajukan pembangunan ekonomi di kawasan ASEAN. Dirgahayu Indonesia, dirgahayu ASEAN.



The Special ASEAN Summit Plus Three on Covid-19.

Sumber: ASEAN.org

# PARA PEMIMPIN ASEAN BAHAS BERBAGAI ISU PENTING DI KTT ASEAN KE-36

Rizky Anugerah Putra, Direktorat Kerja Sama Politik dan Keamanan ASEAN



Para Kepala Negara/  
Pemerintahan  
Negara Anggota  
ASEAN akhirnya  
bertemu secara  
virtual dalam  
Konferensi Tingkat  
Tinggi (KTT) ke-  
36 Perhimpunan  
Bangsa-Bangsa Asia  
Tenggara tersebut.

Setelah sempat tertunda akibat pandemi COVID-19, KTT ke-36 ini menjadi pertemuan rutin tahunan pertama para pemimpin ASEAN di tahun 2020, yang akhirnya sukses terselenggara meskipun melalui telekonferensi video pada 26 Juni 2020.

Perdana Menteri (PM) Vietnam Nguyen Xuan Phuc, selaku Ketua ASEAN tahun ini, memimpin jalannya pertemuan yang diikuti oleh seluruh Kepala Negara/Pemerintahan Negara Anggota ASEAN dan Sekretaris Jenderal ASEAN. Presiden Joko Widodo hadir dalam KTT, dengan didampingi Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, serta Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Vietnam sebagai Ketua ASEAN tahun ini mengusung tema "*Cohesive and Responsive*". Tema itulah yang diturunkan menjadi agenda pembicaraan dalam KTT ini, yaitu: (1) upaya pembangunan Masyarakat ASEAN; (2) peningkatan kerja sama dengan Mitra Wicara ASEAN; dan (3) kontribusi ASEAN terhadap kerja sama kawasan maupun global.

Isu pandemi COVID-19 juga tentunya tidak luput dari pembahasan, mengingat kondisi dunia dan juga



kawasan ASEAN yang saat ini masih sangat terpuak oleh dampak fisik maupun ekonomi akibat wabah tersebut. Dengan jumlah penduduk yang mencapai lebih dari 622 juta dan dengan jumlah penyebaran yang telah mencapai lebih dari 130.000 kasus terkonfirmasi, ASEAN sebagai sebuah organisasi regional harus betul-betul memperhatikan upaya bersama penanganan pandemi ini.

Pada agenda upaya pembangunan Masyarakat ASEAN, yang menjadi pokok bahasan tentunya adalah perkembangan yang bergulir di ketiga pilar Masyarakat ASEAN. Di pilar sosial-budaya ASEAN, tahun ini merupakan "*Year of ASEAN Identity*", yaitu berbagai kampanye peningkatan rasa kebersamaan dan penyatuan identitas sepuluh negara di Asia Tenggara sebagai satu kesatuan. Inisiatif ini diprakarsai oleh Indonesia dan telah disetujui oleh seluruh Negara Anggota ASEAN untuk mulai diimplementasi.

Sementara di pilar politik dan keamanan, ASEAN dinilai perlu untuk semakin menjaga sentralitasnya di tengah rivalitas negara kekuatan utama dunia yang kini semakin meruncing. Presiden Joko Widodo mengangkat kembali pentingnya penguatan kerja sama yang berlandaskan prinsip-prinsip pada *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* (AOIP), agar ASEAN tidak ikut terombang-ambing tren kerja sama dunia yang semakin mengarah pada eksklusivitas.

Kemudian di pilar ekonomi, ASEAN terus mengupayakan berbagai inisiatif ekonomi yang berpotensi menguntungkan ASEAN, antara lain penandatanganan *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) yang direncanakan pada November 2020. Pemajuan kerja sama ASEAN di sektor pariwisata, Smart City Network, hingga infrastruktur digital terutama bagi UMKM juga perlu terus dipercepat realisasinya.

Lebih jauh mengenai stabilitas ekonomi, Indonesia secara khusus menekankan agar konektivitas suplai barang dan jasa harus tetap dijaga bersama meskipun di tengah pandemi ini, agar produksi ekonomi seluruh Negara Anggota ASEAN tidak terhambat.

Sebagai tindak lanjut KTT Khusus COVID-19 April lalu, seluruh Kepala Negara ASEAN juga telah menyetujui berbagai rekomendasi yang dihasilkan oleh *ASEAN Coordination Committee Working Group on Public Health Emergency* (ACCWG-PHE). Para Kepala Negara ASEAN juga menyetujui berbagai langkah-langkah terukur seperti pembentukan dana penanganan bersama, mekanisme penyediaan pasokan medis kawasan, pengembangan *Standard Operating Procedures* dalam kedaruratan kesehatan masyarakat di ASEAN, penguatan mekanisme *contact tracing* dan pembentukan kerangka pemulihan menyeluruh ASEAN perlu segera ditindaklanjuti.

Sumber: shutterstock



Para Kepala Negara ASEAN juga menyoroti kebijakan penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh masing-masing Negara Anggota, yang dirasa memerlukan koordinasi bersama. Hal ini dibutuhkan agar ASEAN sebagai suatu kesatuan dapat memulihkan ekonomi kawasan.

Selain itu, Indonesia juga berpandangan bahwa pandemi ini tidak menghalangi mobilitas barang, jasa, dan juga manusia. Perpindahan manusia masih dapat dilakukan asalkan disertai dengan pengaturan protokol kesehatan yang ketat. Presiden Joko Widodo menyampaikan usulan pembentukan

"ASEAN Travel Corridor" yang memungkinkan perjalanan di dalam kawasan dilakukan secara terukur, dengan kehati-hatian, bertahap dan memperhatikan protokol pencegahan COVID-19. Pada saat ide tersebut disampaikan, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, dan Singapura menanggapi dengan positif.

Selain perkembangan di setiap pilar ASEAN maupun upaya bersama penanganan COVID-19, para Pemimpin ASEAN juga membahas isu-isu regional yang tengah mengemuka. Isu penyelesaian sengketa teritorial Laut China Selatan (LCS) kembali

diangkat pada kali ini. ASEAN terus menekankan pentingnya menciptakan situasi kondusif yang berdasar kepada hukum internasional, serta perlunya penyelesaian secara cepat *Code of Conduct (COC) in the South China Sea* demi mendukung terciptanya stabilitas di LCS. Isu pengungsi dari Rakhine State, Myanmar, juga turut diperbincangkan, dengan tindak lanjut perlunya percepatan proses repatriasi pengungsi dari Rakhine State yang saat ini berada di luar Myanmar kembali ke wilayah asalnya.

Pertemuan KTT ke-36 ASEAN telah membawa butir-butir penting yang dapat memajukan kerja sama di kawasan Asia Tenggara. Terdapat 2 outcome documents yang disepakati pada kesempatan ini, yaitu: *ASEAN Leaders' Vision Statement on a Cohesive and Responsive ASEAN* yang memuat visi para pemimpin ASEAN yang kiranya dapat tercapai pada tahun ini di bawah kepemimpinan Vietnam, dan; *ASEAN Declaration on Human Resources Development for the Changing World of Work*. Selain itu, para pemimpin ASEAN juga mengesahkan Chairman's Statement, yaitu dokumen yang rutin dikeluarkan pada setiap KTT yang berisi kesepakatan posisi ASEAN atas isu-isu mengemuka baik internal maupun eksternal ASEAN.

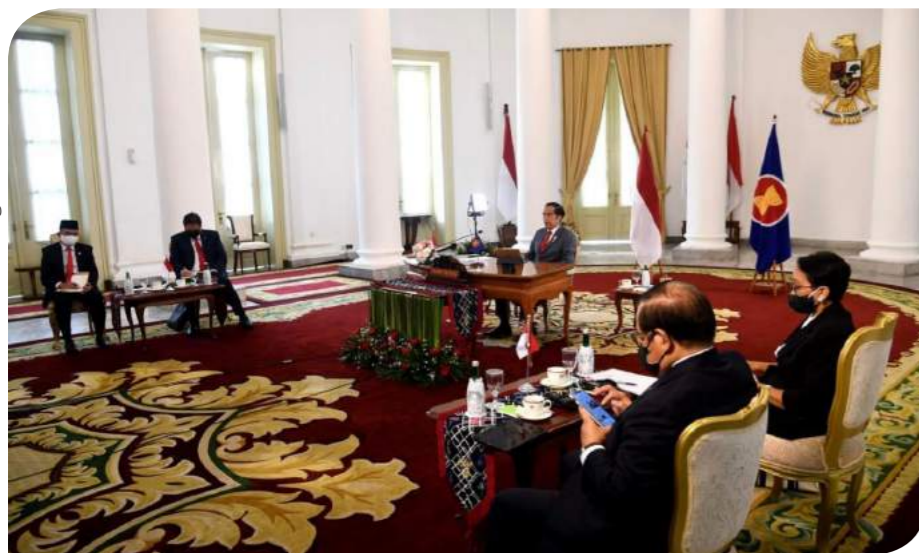
# PARA PEMIMPIN ASEAN BERKOMITMEN MELAWAN COVID-19

Rizky Anugerah Putra, Direktorat Kerja Sama Politik dan Keamanan ASEAN



Sejak akhir tahun lalu, dunia dikejutkan dengan kemunculan wabah yang kelak tumbuh menjadi pandemi. Virus corona baru SARS-CoV-2 atau yang pandemi-nya diberi nama coronavirus disease 2019 (COVID-19) muncul pertama kali di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di akhir 2019.

Sumber: Kementerian Luar Negeri RI



Berawal dari satu kota, pandemi ini telah menyebar ke seluruh dunia dan menjangkiti puluhan juta orang. Selain dari kerugian fisik dan kehilangan nyawa, pandemi ini juga menimbulkan dampak lain yang tak kalah mencemaskan: penutupan batas-batas negara, kemerosotan ekonomi global, hingga berkurangnya lapangan kerja.

Negara-negara anggota ASEAN turut menjadi korban wabah COVID-19. Seluruh negara anggota ASEAN memiliki warga negara yang terjangkit COVID-19, banyak di antaranya meninggal. Bandara-bandara di negara ASEAN terpaksa ditutup demi mengurangi laju perpindahan wabah. Stimulus ekonomi juga harus dikeluarkan oleh negara-negara ASEAN demi menyelamatkan kondisi nasionalnya. Sebagai sebuah institusi, ASEAN juga mengalami kerugian ataupun perlambatan kerja sama akibat COVID-19. Pada 10 April 2020, terdapat setidaknya 235 kegiatan ataupun pertemuan ASEAN yang harus dimodifikasi, ditunda maupun dibatalkan.

### SPECIAL ASEAN SUMMIT ON COVID-19

Menghadapi pandemi yang berpotensi menyebabkan resesi global ini, ASEAN berkomitmen meningkatkan kerja sama dalam penanganan COVID-19. Pada 14 April 2020, ASEAN menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Khusus mengenai COVID-19 melalui telekonferensi video. KTT ini dipimpin oleh Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc dan dihadiri oleh seluruh kepala negara/pemerintahan Anggota ASEAN serta Sekretaris Jenderal ASEAN. Presiden Joko Widodo hadir dalam KTT tersebut dengan didampingi oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Kesehatan dr. Terawan Agus Putranto.

Tujuan dari pelaksanaan ASEAN Special Summit on COVID-19 ini jelas: pandemi ini dirasa telah sangat berdampak luas dan masif bagi ASEAN sebagai sebuah organisasi regional maupun sebagai satu masyarakat, baik secara fisik, materi, maupun psikis, sehingga membutuhkan inisiatif bersama untuk menanganinya. Setiap negara anggota ASEAN tentu memiliki visi, rencana,

kemampuan, dan pendekatan yang berbeda-beda dalam menghadapi pandemi global ini. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu koordinasi dan juga *sharing of experience* agar usaha masing-masing tersebut dapat terharmonisasi, terukur, dan efektif bagi seluruh masyarakat ASEAN. Melalui jalan tersebut, seluruh pemerintah dapat saling belajar mana langkah yang optimal dan mana yang tidak efektif. Karena dalam pertarungan melawan penyakit menular, sedikit saja informasi mengenai kelemahan virus ataupun keberhasilan sebuah pengobatan sangatlah mungkin menyelamatkan banyak nyawa.

Kesepuluh pemimpin ASEAN sepaham bahwa COVID-19 akan menghantam keras aspek sosial-ekonomi regional maupun global. Akibat tertutupnya akses-akses perbatasan untuk menghambat penyebaran wabah, lalu lintas barang maupun jasa tentunya akan sulit difasilitasi. Dampaknya, permintaan (*demand*) pasar bisa saja tidak terpenuhi yang lebih jauh dapat menyebabkan kelangkaan dan lonjakan harga. Untuk itu, ASEAN harus



Sumber: ASEAN.org



Sumber: shutterstock

meningkatkan komitmen anggotanya agar konektivitas antar anggotanya tetap terbuka demi kelancaran *supply chain*. Kemudian, ASEAN juga perlu menyiapkan skema pemulihan ekonomi agar gairah pasar tidak melesu terutama ketika nanti sudah siap dibuka kembali. Inisiatif penguatan ekonomi tersebut tentunya demi menunjang ketahanan nasional masing-masing negara anggota ASEAN.

Dari sisi sosial, langkah bersama ASEAN juga sangat diperlukan. Perlindungan maksimal wajib diberikan kepada setiap warga negara anggota ASEAN di mana pun mereka berada, terlebih bagi buruh migran, baik di sesama negara anggota ASEAN maupun di negara ketiga. Beruntung ASEAN telah memiliki *guidelines* bantuan kekonsuleran bagi warga negara anggota ASEAN yang berada di negara ketiga. Selain

itu, pemanfaatan teknologi seperti penyediaan kanal informasi bagi masyarakat, aplikasi *contact tracing*, pemantauan karantina mandiri, juga akan lebih mengefektifkan upaya melawan COVID-19. Penggunaan mekanisme ASEAN yang telah ada seperti *guidelines* atau pun aplikasi teknologi tersebut harus dimaksimalkan demi keselamatan seluruh masyarakat ASEAN.

### PENDEKATAN BOTTOM-UP DAN KOMPREHENSIF DI SELURUH PILAR ASEAN

Sebelum KTT khusus COVID-19 dilangsungkan, para kepala negara/pemerintahan ASEAN terlebih dahulu mendengarkan paparan dari Menteri Luar Negeri Vietnam Pham Binh Minh selaku Ketua ASEAN Coordinating Council (ACC). Ia mengemukakan hasil pertemuan ke-25 ACC yang memberi

rekomendasi percepatan penanganan COVID-19. Sejak pandemi ini mulai menyebar, ASEAN telah mengeluarkan sebuah pernyataan (ASEAN Chair Statement pada 14 Februari 2020 sebagai komitmen politik seluruh negara anggotanya. Kemudian, telah dibentuk juga ASEAN Coordinating Council Working Group on Public Health Emergencies (ACCWG-PHE), sebuah kelompok kerja lintas pilar dan sektor yang mengoordinasi langkah-langkah penanganan bersama ASEAN. Dalam pertemuan ke-25 ACC melalui telekonferensi video pada 9 April 2020, para Menlu ASEAN telah mensinergikan upaya komprehensif di ketiga pilar, antara lain wacana pembentukan dana ASEAN untuk memberantas COVID-19, memastikan arus perdagangan dan jasa intra-ASEAN, potensi kerja sama produksi vaksin, hingga prosedur kedaruratan kesehatan masyarakat di kawasan.

Dalam KTT Khusus COVID-19 ini, Indonesia turut menyampaikan pandangan dan semangatnya untuk kembali menyetatkan masyarakat ASEAN. Secara khusus, Presiden Joko Widodo menyampaikan usulan agar ASEAN memanfaatkan mekanisme kerja sama ASEAN Plus Three atau disingkat APT (ASEAN dan Jepang, RRT, Republik Korea). Ketiga negara Mitra Wicara ASEAN tersebut telah terbukti berhasil menangani COVID-19 di negaranya masing-masing dan tentunya mau berbagi pengalaman dan kapasitas mereka. Di akhir pertemuan, para kepala negara ASEAN menyepakati Declaration of the Special ASEAN Summit on COVID-19 serta rekomendasi ACCWG-PHE untuk diimplementasikan.

Kebijakan para pemimpin ASEAN melalui KTT ini merupakan sebuah komitmen politik yang dapat menentukan nasib masyarakat ASEAN di masa depan. Pengumpulan data maupun rekomendasi kebijakan di ketiga pilar, baik politik-keamanan,



Sumber: shutterstock

ekonomi, dan sosial budaya ASEAN, juga menunjukkan komitmen tinggi menangani pandemi ini secara menyeluruh. Selain itu, pendekatan *grassroot* dan *bottom-up* ASEAN mulai dari tingkat *working group* hingga

kepala negara juga membuktikan integrasi dan ketahanan ASEAN sebagai organisasi kawasan yang mampu berkontribusi nyata bagi masyarakatnya.



Sumber: shutterstock

# ASEAN DAN PANDEMI COVID-19

Riaz Saehu, Direktur Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN Kemlu RI



Sumber: ASEAN.org

**Pada awal 2020, dunia dikejutkan dengan kemunculan sebuah mutasi virus baru yang menyerang sistem pernapasan manusia yang dapat menyebabkan kematian.**

Hal yang menimbulkan kepanikan adalah virus tersebut dapat menyebar secara cepat dan belum ditemukan obat atau vaksin untuk mengatasinya.

Fenomena ini pertama kali dilaporkan ke WHO *Country Office* di China pada 31 Desember 2019. Virus baru itu diduga berasal dari sebuah pasar tradisional di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Selang beberapa waktu, beberapa negara melaporkan kasus

serupa. Menyikapi fenomena tersebut, WHO mengumumkan mutasi virus baru tersebut dengan nama COVID-19 pada 11 Februari 2020. Selanjutnya, virus terus menyebar ke wilayah lain di dunia, termasuk di Asia Tenggara. Sejak 12 Maret 2020 WHO menyatakan fenomena penyebaran COVID-19 sebagai pandemi.

Pada 13 Januari 2020, Thailand mengkonfirmasi kasus pertama COVID-19 di negaranya yang disusul oleh Singapura, Vietnam, Malaysia, dan

Filipina berurutan pada bulan yang sama. Menyusul negara anggota ASEAN lainnya, Indonesia mengkonfirmasi kasus COVID-19 pertamanya pada 2 Maret 2020. Laos dan Myanmar adalah 2 (dua) negara terakhir di ASEAN yang mengkonfirmasi kasus COVID-19 pada 24 Maret 2020. Per 26 Juli 2020, total kasus COVID-19 di ASEAN adalah 196.337 kasus dimana Indonesia dan Filipina merupakan dua negara dengan jumlah kasus tertinggi dan Laos sebagai negara dengan jumlah kasus terendah, seperti yang dilansir dari WHO.





Sumber: Kementerian Luar Negeri

### RESPONS CEPAT ASEAN

Sebulan sebelum WHO menyatakan COVID-19 sebagai pandemi, ASEAN telah menunjukkan langkah responsif terhadap situasi dunia saat itu. Pada 15 Februari 2020, ASEAN telah mengeluarkan Chairman's Statement on ASEAN Collective Response to the Outbreak of Coronavirus Disease 2019, yang berisi komitmen para pemimpin ASEAN untuk menjunjung solidaritas, menekankan pentingnya perlindungan warga ASEAN, kerja sama pertukaran informasi, pengalaman, dan *best practices*, serta menegaskan peran penting WHO dan sektor kesehatan dalam penanganan pandemi COVID-19.

Tidak berhenti di situ, para Menteri Luar Negeri ASEAN pada 20 Februari 2020 menggelar Special ASEAN Coordinating Council Meeting dan Special ASEAN-China Foreign Ministers Meeting on COVID-19 di Vientienne, Laos. Kesempatan tersebut dimanfaatkan untuk mengimplementasikan komitmen para pemimpin ASEAN seperti yang dijelaskan sebelumnya.

Sebagai langkah tindak lanjut komitmen para kepala negara dan

menteri luar negeri ASEAN, ASEAN kemudian membentuk sebuah *working group* yang khusus membahas penanganan *public health emergencies* di kawasan, yang kemudian disebut dengan ASEAN Coordinating Council Working Group on Public Health Emergencies (ACCWG-PHE). Pertemuan pertama ACCWG-PHE diselenggarakan secara virtual pada 31 Maret 2020.

Indonesia menggunakan kesempatan tersebut untuk mendesak ASEAN mengadakan pertemuan virtual antara

para pemimpin ASEAN dan ASEAN Plus Three khusus COVID-19. Hal tersebut penting untuk memberikan sinyal positif kepada masyarakat, dunia usaha dan investor, bahwa para Pemimpin ASEAN dan ASEAN Plus Three sedang mengambil langkah bersama untuk mitigasi penyebaran COVID-19 dan berupaya mengurangi dampak negatif terhadap resesi perekonomian di kawasan.

Pertemuan khusus ini juga menjadi kesempatan yang baik untuk memperoleh informasi langsung dari



Sumber: Kementerian Luar Negeri

pemimpin Jepang, Korea dan RRT yang telah memiliki pengalaman baik dalam mengurangi penyebaran *coronavirus* di negaranya. Pertemuan khusus itu juga akan memperkuat kolaborasi ASEAN Plus Three antara lain untuk mempermudah akses peralatan kesehatan, obat-obatan, dan kerja sama pembuatan vaksin, jika kelak ditemukan.

### MEKANISME KERJA SAMA KESEHATAN DAN PENANGANAN COVID-19 DI ASEAN

ASEAN telah memiliki beberapa mekanisme kerja sama di bidang kesehatan dalam rangka kesiapan dan respons terhadap *public health emergencies*. Badan sektor yang khusus menangani isu kesehatan berada di bawah Pilar Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN adalah melalui mekanisme pertemuan tingkat pejabat tinggi dan Menteri Kesehatan ASEAN yang dinamakan Senior Official Meeting on Health Development (SOMHD) dan ASEAN Health Ministerial Meeting (AHMM).

Sejak 2020 hingga dua tahun ke depan, Kementerian Kesehatan RI menjadi ketua dari badan sektor dimaksud. Sementara itu, di bawah mekanisme kerja SOMHD dan AHMM terdapat 4 jenis subkerja sama (Health Clusters) di mana salah satunya yaitu ASEAN Health Cluster 2: Responding to All Hazards and Emerging Threats yang secara khusus menangani masalah pandemi.

Sementara itu, terdapat pula beberapa mekanisme kerja sama lain yaitu ASEAN Emergency Operations Centre Network for public health emergencies (ASEAN EOC Network), ASEAN Plus Three Field Epidemiology Training Network (ASEAN+3 FETN), dan ASEAN Biodiaspora Virtual Centre, yang secara reguler memberikan informasi terkini terkait perkembangan kerja sama kesehatan di ASEAN, pelatihan para tenaga kesehatan, dan pertukaran informasi dan pengalaman sesama tenaga kesehatan di ASEAN.

Isu pandemi bukan yang pertama dihadapi oleh ASEAN. Sebelumnya secara bersama-sama ASEAN telah bekerja sama dalam menanggulangi

SARS, H5N1 (Bird Flu), H1N1 (Swine Flu), Ebola dan Zika.

Namun, dalam menangani COVID-19 yang telah memberikan dampak besar bagi kehidupan masyarakat, negara-negara di ASEAN sepakat untuk memperkuat dan meningkatkan upaya-upaya kerja sama kesehatan di ASEAN, baik dengan memperkuat mekanisme kerja sama yang sudah ada, maupun dengan membentuk inisiatif-inisiatif baru.

Rangkaian pertemuan melalui *video conference* telah terlaksana untuk memperkuat kerja sama yang telah ada, utamanya dengan para mitra wicara ASEAN, seperti Plus Three Countries, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Rusia. Pertemuan di bawah mekanisme baru ACCWG-PHE juga diselenggarakan kembali pada 22 Juni 2020, untuk mengintensifkan kembali upaya penanganan pandemi di kawasan.

Para pemimpin ASEAN juga telah mengadakan pertemuan untuk memastikan upaya bersama ASEAN dalam situasi darurat saat ini. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN dan KTT ASEAN Plus Three

diselenggarakan pada 14 April 2020, khusus untuk membahas penanganan COVID-19. Para kepala negara ASEAN kemudian kembali bertemu dalam KTT ASEAN ke-36 pada 26 Juni 2020 untuk membahas perkembangan penanganan COVID-19 di kawasan.

Dari beberapa pertemuan yang telah diselenggarakan, ASEAN menyepakati tiga belas inisiatif baru yang diusulkan dalam kerja sama kesehatan di ASEAN. Beberapa dari inisiatif tersebut sedang dalam tahap pembentukan dan penyusunan gagasan dari masing-masing *lead country*. Yang terbaru, ASEAN telah membentuk COVID-19 ASEAN Response Fund, sebuah kerja sama dana tanggap darurat sebagai langkah responsif penanganan COVID-19.

### PENANGANAN COVID-19 DI ASEAN: DIPLOMASI INDONESIA

Diplomasi Indonesia tetap aktif dalam penggalangan bantuan dan dukungan untuk penanganan COVID-19 di dunia, khususnya di ASEAN. Hal ini terlihat sejak Presiden RI melakukan komunikasi telepon dan mengadakan pembicaraan dengan Perdana Menteri



Sumber: Sekretariat Negara

Vietnam pada 4 Februari 2020. Presiden RI menyampaikan perlunya negara anggota ASEAN bertindak proaktif dan mengkoordinasikan skema pencegahan penyebaran virus. Indonesia juga mendorong koordinasi, termasuk bantuan kekonsuleran bagi warga negara ASEAN. Komunikasi via telepon juga dilakukan dengan Perdana Menteri Malaysia, Singapura, dan Thailand.

Presiden RI juga kerap menyampaikan pentingnya *unity and synergy* dalam penanganan COVID-19 di ASEAN, serta kerja sama untuk melindungi masyarakat ASEAN di masing-masing negara. Hal ini juga kerap ditekankan kembali oleh Menlu RI dalam beberapa pertemuan, seperti dalam pertemuan ke-26 ASEAN Coordinating Council (ACC) pada 24 Juni 2020.

Sebagai tindak lanjut arahan Presiden RI dalam pertemuan-pertemuan

ASEAN dimaksud, Indonesia menggagas beberapa inisiatif penguatan kerja sama kesehatan di ASEAN, yakni penyusunan protokol *contact tracing and outbreak investigation*, gugus tugas penanganan pandemi dengan Plus Three Countries, kerja sama farmasi di ASEAN, dan penyusunan ASEAN Travel Corridor Arrangement.

Kementerian Luar Negeri RI, bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan RI, telah menindaklanjuti inisiatif dimaksud, melalui serangkaian penyusunan Concept Note dan koordinasi, baik dengan negara ASEAN lainnya maupun dengan focal point di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menjamin kesiapan Indonesia dalam menjalankan inisiatif dimaksud, juga untuk mendapatkan dukungan dari negara-negara ASEAN lainnya. Inisiatif-inisiatif yang digagas oleh

Indonesia tersebut akan meningkatkan upaya penanganan COVID-19 di ASEAN dan berkontribusi penuh pada upaya peningkatan ketahanan kawasan dalam menghadapi *public health emergencies* di masa depan.

Upaya demi upaya terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia, baik di ASEAN maupun dalam tataran bilateral dan multilateral. Kontribusi yang diberikan secara maksimal adalah satu-satunya cara yang terbaik untuk menangani COVID-19. Diplomasi Indonesia di ASEAN dalam menangani isu ini juga tidak akan berhenti sampai di sini. Masih banyak hal yang harus dilakukan, masih banyak pula kontribusi yang dapat Indonesia tingkatkan untuk mengatasi pandemi ini secepat mungkin. Sejalan dengan apa yang para pemimpin dunia gaungkan, yaitu untuk bersatu dalam menangani COVID-19.



# SOSIALISASI PENANGANAN COVID-19 DI ASEAN MELALUI WEBINAR

Janita Jaya, Sekretariat Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN

Istilah webinar semakin populer semenjak warga masyarakat bekerja dari rumah (*work from home/WFH*) di masa pandemi ini.





Sumber: shutterstock

**K**ata webinar telah tercantum dalam kamus daring Cambridge English Dictionary, yang mendefinisikan kata itu dengan “an occasion when a group of people go online at the same time to study or discuss something.” Webinar dapat juga berarti seminar daring maupun kuliah *online*. Ini berkaitan dengan makin banyaknya instansi dan lembaga pendidikan bertransformasi dari sistem pengajaran tradisional tatap muka ke pendidikan jarak jauh (PJJ) menggunakan jalur komunikasi ini.

Berbagai unit kerja di Kementerian Luar Negeri juga telah melaksanakan kegiatan webinar sebagai forum diskusi dan sosialisasi isu-isu prioritas politik luar negeri RI, salah satunya terkait dengan penanggulangan dan mitigasi pandemi COVID-19. Dalam usaha pemasyarakatan

Masyarakat ASEAN, Kementerian Luar Negeri kini juga menjajaki sistem webinar yang dapat menjangkau masyarakat luas dan waktu serta lokasi pelaksanaannya sangat fleksibel. Hal ini disambut baik oleh *stakeholder* Kementerian Luar Negeri, khususnya perguruan tinggi dan instansi pendidikan lainnya.

Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN (Ditjen KSA) Kementerian Luar Negeri, sebagai bagian dari Sekretariat Nasional ASEAN—Indonesia, telah membangun kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi di Indonesia dalam pembentukan Pusat Studi ASEAN (PSA) semenjak 2012. Hingga saat ini, terdapat 68 PSA yang tersebar di provinsi-provinsi di Indonesia. Melalui kerja sama dengan PSA, Kementerian Luar Negeri telah menyelenggarakan berbagai kegiatan pemasyarakatan ASEAN, melalui kuliah

umum, seminar, forum diskusi, maupun kompetisi tingkat pelajar dan mahasiswa. PSA juga melakukan penelitian atau pengkajian ilmiah mengenai masalah-masalah hubungan dan kerja sama regional ASEAN, di mana hasil kajian tersebut menjadi masukan untuk Kementerian Luar Negeri.

Di masa pandemi COVID-19 ini, Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN tetap menjalankan komitmennya dalam penyebaran informasi dan pemasyarakatan ASEAN melalui webinar bekerja sama dengan PSA di berbagai wilayah di Indonesia. Sepanjang Mei hingga Juli 2020, Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN telah menyelenggarakan sedikitnya lima webinar dengan PSA, yang dapat diakses oleh seluruh *civitas academica* maupun disiarkan secara *live streaming* yang

terbuka untuk masyarakat. Di Majalah Masyarakat ASEAN edisi ini, kita akan mengulas sedikit mengenai topik-topik webinar yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN dan beberapa PSA.

### VIDEO CONFERENCE DENGAN 68 PSA DI INDONESIA

Untuk mendiseminasikan informasi penanganan pandemi COVID-19 di wilayah ASEAN, Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, Perwakilan Tetap Republik Indonesia untuk ASEAN (PTRI ASEAN), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan 68 PSA di Indonesia untuk bertemu dan berdiskusi dalam forum webinar “Kiprah ASEAN di Tengah Pandemi COVID-19” pada 20 Mei 2020. Kegiatan ini diharapkan dapat menyebarluaskan informasi terkait

perkembangan COVID-19 di Kawasan ASEAN serta upaya-upaya kolektif yang telah dilakukan oleh ASEAN sebagai organisasi regional untuk mempercepat penanganan pandemi COVID-19 di kawasan Asia Tenggara.

Pada kesempatan ini, Direktur Jenderal (Dirjen) Kerja Sama ASEAN Jose Tavares memaparkan peran ASEAN di tengah pandemi COVID-19. Dalam paparannya, ia menjelaskan mengenai respons dan kebijakan negara anggota ASEAN dalam mengurangi penyebaran COVID-19 melalui pengambilan kebijakan, seperti penerapan status darurat COVID-19, pembatasan bagi warga asing, pelarangan pertemuan massal, penutupan atau pengurangan frekuensi penerbangan, pemberlakuan persyaratan tambahan bagi warga asing yang berkunjung ke negara ASEAN, dan lain-lainnya. Adapun Jose Tavares juga menjelaskan respons kolektif yang dilakukan ASEAN dalam masa pandemi COVID-19, seperti Special ASEAN Summit on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan Special ASEAN Plus Three (APT) Summit on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

Di dalam webinar ini juga, Wakil Tetap Republik Indonesia (Watapri) ASEAN, Duta Besar Ade Padmo Sarwono, menyampaikan paparan mengenai “Isu-isu Lain yang Berkembang di Tengah Pandemi COVID-19”. Ia menjelaskan isu-isu yang saat ini berpengaruh dalam stabilitas kawasan dari segi politik-keamanan, ekonomi dan konektivitas, serta sosial-budaya, seperti isu Laut China Selatan, Rakhine State, ASEAN Single Window, ASEAN Identity, penanganan bencana alam, pembangunan berkelanjutan, serta peran perempuan dalam perdamaian dan keamanan. Di dalam paparannya, Ade Padmo Sarwono juga menjelaskan mengenai arsitektur kawasan, di antaranya adalah pengimplementasian ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP), penyelesaian perundingan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), dan kerja sama dengan mitra eksternal ASEAN.

Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri (BKSLN) Kementerian Kesehatan Acep

Somantri juga menyampaikan paparan mengenai “Kerja Sama Sektor Kesehatan ASEAN dalam Penanggulangan COVID-19”. Ia menjelaskan saat ini Indonesia adalah Ketua Kerja Sama Sektoral Kesehatan ASEAN 2020-2021, di mana Indonesia memiliki visi mendorong sistem kesehatan ASEAN yang lebih tangguh dan responsif.

Sebagai contoh, dalam kerja sama ASEAN di sektor kesehatan, Indonesia bekerja sama dengan negara-negara ASEAN Plus Three dalam *update* situasi harian negara ASEAN Plus Three, penelusuran kontak penderita COVID-19, berbagi pengetahuan dan keahlian, Epidemiology Training Network, revitalisasi sistem kesehatan pasca-pandemi COVID-19, dukungan teknis, serta material dan finansial. Dalam rangka mendukung public health emergency coordination, juga dibentuk ASEAN COVID-19 Response Fund, ASEAN Reserve Warehouse untuk darurat kesehatan masyarakat, standar operating procedure dalam situasi darurat kesehatan masyarakat, serta protokol penelusuran kontak dan investigasi wabah. ASEAN juga memiliki 18 proyek riset dan inovasi dalam penanganan COVID-19 bekerja sama dengan Uni Eropa.

Dalam webinar tersebut, PSA menyampaikan keinginan untuk turut berpartisipasi mendukung pemerintah dalam mengambil kebijakan yang tepat melalui kajian riset perguruan tinggi yang didukung oleh Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Kesehatan. PSA juga mengharapkan agar penelitian terkait COVID-19 juga dapat melibatkan PSA. Hal ini merupakan tanggapan positif dalam hubungan kerja sama Ditjen Kerja Sama ASEAN dan PSA, di mana pihak yang terkait dapat terus meningkatkan sinergi dalam usaha pengambilan kebijakan mengenai mitigasi pandemi.

### RANGKAIAN WEBINAR DENGAN PUSAT STUDI ASEAN

Ditjen Kerja Sama ASEAN akan terus bekerja sama dengan PSA di Indonesia dalam berbagai kegiatan webinar untuk membahas berbagai isu di ASEAN. Tentunya pembahasan isu-

isu di kawasan tak hanya terbatas pada COVID-19, namun juga untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Indonesia mengenai ASEAN, khususnya dalam persiapan ketetuaan Indonesia di ASEAN pada 2023.

Selama masa darurat pandemi COVID-19, Ditjen Kerja Sama ASEAN telah menyelenggarakan webinar dengan beberapa PSA, di antaranya dengan PSA Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) Denpasar, PSA LSPR Communication and Business Institute Jakarta, dan PSA Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Ketiga webinar tersebut membahas isu COVID-19 secara luas, namun juga mendiskusikan tema-tema khusus yang juga penting dalam penanganan pandemi, seperti peran kerja sama dalam forum multilateral dalam penanganan wabah, serta perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri di masa pandemi COVID-19.

Webinar di PSA Undiknas bertajuk "The Perspectives of ASEAN and the European Union on Covid-19 Issues" telah diselenggarakan pada 11 Mei 2020 dengan mengundang Direktur Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN (KSBA) Riaz J.P. Saehu dan Direktur Kerja Sama Intrakawasan dan Antarkawasan Amerika dan Eropa (KSIA Amerop) Masni Eriza. Masih mendiskusikan tema tersebut dengan lebih mendalam, webinar PSA LSPR Communication and Business Institute yang diadakan pada 3 Juni 2020 kembali mengulas "Perkembangan Penanganan COVID-19 di ASEAN dan Uni Eropa" dengan kedua narasumber tersebut.

Masni Eriza menyampaikan informasi mengenai kondisi statistik terkait COVID-19, kebijakan dan langkah Uni Eropa dalam menghadapi pandemi COVID-19. Dalam usaha menanggulangi pandemi, Uni Eropa memberikan dana bantuan sebesar 19,6 juta euro untuk penanggulangan COVID-19 di Indonesia. Uni Eropa juga bekerja sama dengan PBB, institusi finansial internasional, G7, dan G20 untuk membentuk *coordinated multilateral response*. Uni Eropa dan negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, juga saling bantu untuk

mengurus pemulangan warga negaranya yang terdampak di luar negeri karena pembatasan wilayah.

Dalam webinar ini, Riaz J.P. Saehu menjelaskan mengenai berbagai kerangka kerja sama ASEAN dalam sektor kesehatan termasuk penanganan isu bencana kesehatan. Lebih lanjut, ia menjelaskan respons dan kebijakan yang diambil negara anggota ASEAN serta *respons* kolektif ASEAN dalam menghadapi pandemi COVID-19. Selain penyelenggaraan Special ASEAN Summit on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) pada 14 Mei 2020, telah diadakan juga beberapa pertemuan koordinasi badan sektoral ASEAN lainnya untuk menyelesaikan permasalahan masa darurat pandemi.

Secara khusus, Riaz J.P. Saehu menyampaikan pentingnya bahan kajian terkait *biodiversity* dan *zoonosis* sebagai masukan terhadap pengambilan kebijakan socio-ekonomi sebagai upaya pencegahan dan mitigasi pandemi. Mengenai hal ini disampaikan juga bahwa perlu adanya kajian tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap perubahan sosial-budaya di masyarakat ASEAN dan terhadap ekonomi di masa setelah pandemi, di mana PSA dapat berkontribusi dalam merealisasikan kajian ini.

Dalam rangkaian webinar tersebut, PSA Universitas Lambung Mangkurat (ULM) dan Ditjen Kerja Sama ASEAN menyelenggarakan webinar bertajuk

"Kerja Sama Internasional dalam Penanganan Covid-19 dan Pelindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri pada masa pandemi" pada 3 Juli 2020. Webinar ini mengundang Direktur Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN (KSBA) Riaz J.P. Saehu, Direktur Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang (Sosbud OINB) Kamapradipta Isnomo, dan Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (PWNI/BHI) Judha Nugraha sebagai narasumber.

Kamapradipta Isnomo menjelaskan Resolusi PBB Global Solidarity to Fight COVID-19, untuk menyerukan gencatan senjata dalam kaitan

penanganan Covid-19. Ia menjelaskan bahwa Indonesia ikut berperan aktif di Executive Board WHO, salah satunya dengan mendorong kerja sama dalam *trial* obat dan vaksin COVID-19.

Indonesia juga berperan dalam forum Organisation of Islamic Cooperation (OIC), yaitu melalui penguatan OIC Centre of Excellence on Vaccines and Biotechnology Products. Tujuan dari kerja sama internasional ini adalah pembuatan vaksin sebagai kunci membangun imunitas dan melawan COVID-19 dalam jangka panjang. Kerja sama internasional juga sangat diperlukan dalam menjamin ketersediaan dan keterjangkauan vaksin COVID-19 untuk semua negara.

Pada kesempatan tersebut, Judha Nugraha menjelaskan dampak COVID-19 terhadap WNI di luar negeri, baik dari klaster awak kapal yang terdampak COVID-19 maupun klaster WNI yang terjebak pembatasan mobilitas di luar negeri. Dalam webinar dijelaskan bentuk upaya perlindungan WNI/PMI yang terdampak pembatasan mobilitas, yaitu melalui evakuasi, repatriasi mandiri, bantuan logistik untuk kelompok rentan, perlindungan hak ketenagakerjaan, diplomasi perlindungan, serta gotong royong komunitas Indonesia. Ia memberikan contoh-contoh kasus yang terjadi dalam usaha perlindungan WNI khususnya selama masa pandemi COVID-19, serta pertolongan yang dibantu oleh fitur darurat aplikasi Safe Travel yang dikembangkan oleh Kementerian Luar Negeri.

Webinar ini dihadiri oleh para akademisi dan mahasiswa di perguruan tinggi penyelenggara, salah satunya bahkan disiarkan secara *live streaming* melalui YouTube. Sesi diskusi menjadi forum bertukar pendapat dan tanggapan mengenai pengambilan kebijakan penanggulangan pandemi.

Para akademisi memberikan masukan maupun kritik terhadap kebijakan yang saat ini sedang berjalan, sehingga dapat menjadi catatan perbaikan untuk pemerintah. Peran aktif mahasiswa dalam diskusi juga memberikan kesempatan untuk Kementerian Luar Negeri mendorong engagement dari kalangan mahasiswa dalam usaha bersama penanggulangan pandemi COVID-19, contohnya melalui *youth volunteering*.

Mengingat pentingnya pembahasan dan diskusi dalam isu ASEAN, khususnya penanggulangan COVID-19, Ditjen Kerja Sama ASEAN berencana terus mengadakan usaha pemyarakatan melalui *webinar*. Selain untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Indonesia terhadap peran ASEAN dalam usaha penanggulangan pandemi, tetap ada harapan keutuhan Masyarakat ASEAN akan tercapai di tengah prahara pandemi COVID-19.

Sumber: shutterstock





# ARE WE LISTENING? ASEAN'S RESPONSE TO THE COVID-19 IMPACT ON WOMEN AND GIRLS.

Putiviola Elian Nasir, International Relations Department,  
Faculty of Social and Political Sciences, Andalas University

**The COVID-19 outbreak has put a halt on the world. Seven months after the first cases were reported in Wuhan (China) on December 31, 2019, we are still struggling to fully comprehend and eliminate this virus, proven by its ability to survive, despite all of the measures that has been implemented.**

**O**n the contrary, its impact on humanity is anything but a mystery. This pandemic has continuously and blatantly disrupted human lives as we know it. According to the WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard, by July 31, 2020, more than 17.5 million of the world's population has contracted the virus, resulting to almost 700.000 deaths. Specifically for ASEAN, the number of confirmed Covid-19 cases in its Member States reached more than a quarter of a million, with Indonesia having the highest confirmed cases count, followed by the Philippines.

The UN's Framework for the Immediate Socio-Economic Response to the COVID-19 Crisis has stated that the current condition goes far beyond only a health crisis, but is a core socio-economic problem. An important lesson that this pandemic is teaching us, is that history repeats itself. Like other harmful events in the past, women and girls suffer the most. This time, are we listening?

### A MERGING OF SUFFERINGS

To be fair, there has not been a new impact that women and girls suffer in this pandemic. All of these negative effects have been experienced by women and girls all around the world. However, they came at different times and places, to different groups of women and girls, and in a smaller scale. This pandemic is merging all of the suffering at one go; and this makes all the difference.

The impact of COVID-19 on women and girls is multidimensional, but mainly in the health and socio-economy sectors. Since 70% of global medical workers are women and mostly nurses, they become the first and regular contact of COVID-19 patients and this puts them at a high risk of contracting the virus, thus threatening their lives and possibly the future of their career. But this is not their only issue because unequal gendered treatments is still a problem in this sector (as in many other work places) such as difference in pay, low opportunity to become leaders and permanent employees. Social concerns have also risen since numerous news have been published about health workers (mostly nurses) being vacated out of their rented houses because of the fear that they will spread the virus such as in Indonesia and Myanmar.

For other women not working within the health department, health problems come in a diverse sense. With lockdowns in place, many women have stopped seeking

for health care due to the increased burden in their homes. There has also been a fear that this virus will result in a baby boom. Although the overall perception of adding a member to the family is positive, but being pregnant during a pandemic is dangerous for both the mother and the baby, considering the weakening of the mother's immune system and limited health services. Access to reproductive modern contraception was already very low before the pandemic, and with production slowing or shutting down, the gap of supply and demand increases. One of ASEAN Member States, Indonesia, discovered that contraception recipients have declined at an estimated number of 20 to 30 percent within the first quarter of this year (Indonesia's National Population and Family Planning Board/ BKKBN).

One of the saddest but surprisingly expected impact of this pandemic is the rise of domestic violence towards women and girls which has happened globally. Malaysia, Thailand, Singapore, Indonesia, Lao PDR, Vietnam, the Philippines have all experienced increase in calls received through their

domestic violence hotlines, which have doubled or more compared to the same period last year. Furthermore, research conducted by the University of Bristol reported that women from 36 out of 49 countries mainly from Southeast Asia dan Sub Saharan Africa, believed that domestic violence is justifiable.

The International Labour Organization (ILO) reported that less than 40 percent of the global workforce is within the formal economy. This leaves more than 60 percent of the employed population at risk and Southeast Asia is not an exception, where the share of informal economy reached 75.2 percent. Within that 75.2 percent, more of them are women. The problem then becomes more urgent when this type of profession is the only income a single mother can provide for the family.

Women migrant workers are also largely affected by this pandemic. Almost half of the 10 million international migrant workers in ASEAN are women who work in sectors which have been hit by the pandemic: textile and electronic manufacturing, entertainment, and house helpers (Spotlight Initiative).



Sumber: shutterstock

Many of these workers have been sent back to their home countries which then eliminates their only source of income to support their family (many of these migrant workers are the main providers for their family). They will also face social stigma as carriers of the virus from both the receiving country and also by their society back home. For those who can stay, they will be confined in their congested residence without being able to apply safety protocols. They could also be in danger of being mentally, physically and sexually abused.

Stay-at-home mothers are not exempt from this virus' effect. Contrariwise, the amount of unpaid work and care that they have been doing have skyrocketed due to caring care of the elderly, non-stop house work because all the family members are home and in addition, helping and even teaching their children to help for the lack of educational attention. Working mothers who work from home have also had to manage time between careers and taking care of the house and the children, thus increasing their burden and impacting their career. All of this contributes to the deteriorating mental health of these women.

**ASEAN'S RESPONSE**

As a regional organization whose Member States have been significantly affected by COVID-19, through its special meetings and summits, ASEAN has prepared blueprints to respond to the pandemic outbreak while still maintaining cooperation between member states and its international partners. But it was the Joint Statement of The ASEAN Ministerial Meeting on Social Welfare and Development, Mitigating Impacts of COVID-19 on Vulnerable Groups in ASEAN, that specifically highlighted the issues of women and girls and other vulnerable groups amid the pandemic. Through this statement, ASEAN recognized that women and girls have been disproportionately affected by COVID-19 in health and socio-economic sectors, compared to men and boys. There are seven plans within this statement to help resolve or lessen the burden of

COVID-19 impact ranging from financial support to developing more gender responsive measures and plans.

Even before the Joint Statement of The ASEAN Ministerial Meeting on Social Welfare and Development, Mitigating Impacts of Covid-19 on Vulnerable Groups in ASEAN, understanding the impact of COVID-19 towards domestic violence, the ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (ACWC) held a Special Online Meeting on the Protective and Preventive Measures for Women and Children at Risk of Domestic Violence during the COVID-19 Pandemic on June 5, 2020. The ACWC Chair, Laura Hwang Cheng Lin, declared the organization being the "regional focal point for the promotion and the protection of the rights of women and children". Based on this purpose, the meeting involved statistics and data exchange between Member States' representatives, and also discussed recommendations considered as effective to tackle the problem.

A stronger statement declared by The ASEAN Women for Peace Registry (AWPR) also on June 5, 2020 in its message on the impact of COVID-19 which was posted on its website stressed "the need to ensure the role of women as one central stakeholder during times of the pandemic pursuant to the four pillars of Women, Peace, and Security (WPS) namely in the prevention, protection, participation, and recovery and relief". AWPR further elaborated on activities in accordance with this statement by developing an agenda based on WPS pillars in crisis management, government policy and development programming; increasing awareness on COVID-19 impacts by encouraging data sharing and availability; and focusing on policy research related to women's economic empowerment.

**ARE WE LISTENING?**

ASEAN is already on the right track. In resolving any problem, by anybody, the first step is to recognize that there is indeed something wrong and then

identify the root cause which also needs to be eliminated. Through Joint Statement of The ASEAN Ministerial Meeting on Social Welfare and Development, Mitigating Impacts of COVID-19 on Vulnerable Groups in ASEAN, the organization has explicitly declared its awareness of inequality faced by women and girls in the region and established plans to lessen the gap. ACWC and AWPR have first stated their support through meetings to address the impact and also create suggestions.

However, it is AWPR's message that highlighted how women should also participate in all of these actions related to their welfare, including policy making. It is unnatural and unfair how a group of people who are mostly affected by something, has no or very little voice in deciding what can and should be done to them. Gender equality is no longer a myth, it contributes to the achievement of national development, thus helping the world to achieve international development as aspired by The United Nations through the Sustainable Development Goals.

Further work needs to be done by the Member States because they are arguably the ones who are most responsible for the current inequality and discrimination hovering over their people. One of the underlying causes of gender inequality is the social and cultural values of patriarchy which is evident in ASEAN's Member States. But this is not the primary cause; people devaluing women and girls on the basis of this social system is where the problem lies.

The community not being able to see that this is wrong and believing that this is only natural, eliminates any possibilities for solutions. Not only will socio-economic advancements help resolve inequality, but more importantly, there needs to be specific educational and cultural approach which honestly discusses and try to resolve gender inequality. We should not need another pandemic to take action; giving people their rights should not have been a problem in the first place.



Sumber: Rare Historical Photos

# WOMEN, WAR, AND PEACE

Adfikri Kevin Marvel, Directorate of ASEAN External Cooperation

**The relation between gender, militarism, and peace has been put under microscope, especially in the last few years. Some argue that there is correlation among them while some even go deeper by saying there is causality relation among these variables.**

The relation between gender, militarism, and peace has been put under microscope, especially in the last few years. Some argue that there is correlation among them while some even go deeper by saying there is causality relation among these variables.

Francis Fukuyama, for example, says in his article 'Women and the evolution of world politics' in 1998 that there is biological basis for sex differences in international affairs. He argues that men are more likely to engage in aggression and war; while in contrast "a world run by women" would be "less aggressive, adventurous, competitive and violent."

The increasing discussion recently regarding women's involvement in wartime arguably pertains to UNSC Resolution 1325 which mandates women to participate in the making and keeping of peace in the international arena. As a context, for the sake of the article, we would define gender is set of social characteristics presumed to be related to perceived membership in biological categories of male and female, hence "men and women".

Apart from risking ourselves to nature vs nurture debate (which I think almost always is actually a combination of both), I am of the belief that opting into the tactic of this naturalistic view of gender and its relations with peace is not strategic for women empowerment – especially in the context of war or conflict.

I would like to discuss mainly the situations and reasons why women are vulnerable in the vast majority of wartime. I also would like to analyse the proper way to redress that vulnerability without opting to radical feminist's "women are inherently better than men" argument. Both discussion will be intertwined within this article.

Hopefully, we would manage to take a deep dive to see what women often represent during wartime, how they interact with different cultures and how different circumstances

more often than not becomes decisive in positioning the way to get women included in the post-conflict reconstruction or peacebuilding attempt. I believe this understanding would enable more and more women to partake in the process.

**WE SHOULD NOT TO RUN "WOMEN ARE BETTER" ARGUMENT)**

We should take a look at the benefits of using women's inspirational stories and being culturally sensitive instead of talking about natural characteristics and identity politics. I believe the benefits are threefold: firstly, it enables us to make arguments about involving women, not because they are going to be better than men at handling the issues, but because the issues naturally concern them and they might be able to give unique perspective (unique that should be framed in equal manner, not better).

Secondly, we should acknowledge intersectionality in the way each gender behaves, which is to say that some women respond differently to different stimuli, and to expect all women should display caring or reserved attitude is in itself pernicious and might potentially affirm the pre-conceived hierarchy of traits that has harmed women for a long time.

Thirdly, we have to acknowledge that given women's position during wartime hasn't always been favourable. That is regrettable, but that is the reality we have to come to terms with should we want to mould proper tactic for the situation. Improving women's involvement is essentially an attempt to alter the system – the question is definitely not whether it is desirable or not, but rather become "do we want to frame it in reformist manner or revolutionary manner, do we want to get massive pushback based on people invoking the argument of culture or not".

Because the former means that the change is going to be incremental and hopefully steady, while the counter-argument (especially from the



Bougainvillean women, integral part in peace talks due to matrilineal traditions Soldiers Without Guns.

Sumber: Soldiers Without Guns (Will Watson)

advocates of revolutionary approach) is that reformist approach will not be fast enough and substantial. When we are going against existing system, not only will people who want to empower women will have to fight patriarchy supported by misogynist men, often these people also have to fight against women who have been habituated and internalized patriarchy so much so that they do not believe women should take more active role during wartime themselves. Therefore, we should be cautious in framing the issue.

**PERSISTING HARDSHIP AND CULTURAL SIGNIFICANCE**

Let us also make things clear first and foremost, whether or not women are more susceptible to be the victims of violence in conflict should not even be up to debate. There's great urgency why

we need to talk about tactic in including women in peacebuilding process. Violence against women is one of the world's greatest public secret, this is not to say that this happens in all instances, again, not ALL.

Women are not always victim, and the portrayal of how the world works for women in conflict is neither monochromatic nor despotic. But there are clear structural reasons why more women fall victims during wartime than men. Women are raped as a way to humiliate the men they are related to, who are often forced to watch the assault.

In societies where ethnicity is inherited through the male line, 'enemy' women are raped and forced to bear children. Women who are already pregnant are

forced to miscarry through violent attacks. Women are kidnapped and used as sexual slaves to service troops, as well as to cook for them and carry their loads from camp to camp. They are purposely infected with HIV/AIDS, as slow, painful murder. One of the possible reasons for this is an attempt to destroy culture and demoralize enemy combatants (especially in extremely tribal conflict).

Sondra Hale tells rape as at once a cultural identifier and an erasure of cultural difference in the ethnocidal conflicts in Darfur and the Nuba Mountains in Sudan. In this case, there are multiple groups fighting, namely Janjaweed, Fur, Zaghawa, and Masalit, and the tactic of committing wartime rape happens arguably for the aforementioned reasons. Surveys

in Sierra Leone show that about 94 percent of displaced families had experienced sexual assaults, including rape, torture and sexual slavery. At least 250,000 – perhaps as many as 500,000 – women were raped during the 1994 genocide in Rwanda. We also read reports of sexual violence in the ongoing hostilities in Algeria, Myanmar, Southern Sudan and Uganda. We learned of the dramatic increase in domestic violence in war zones, and of the growing numbers of women trafficked out of war zones to become forced labourers and forced sex workers. That is the embodiment of what women culturally represent in the respective areas. As opposed to putting the naturalistic "women are better than men" or "men are better than women", I believe that putting women's contributions during wartime and inspiring generations

of women (and men alike) is very possible. Something that may be used to inspire, or to argue in favour of more involvement in deciding the outcome of the war or to be involved in strategic decision-making. We actually have many study cases to craft such narrative.

During WW II, the US' success in driving the Japanese out of Baguio, the mountainous summertime capital of Philippines, was credited to the indigeneous Igorot women led by "a wizened old lady," Aning Andao. With Aning, many women went to the area where the bulldozers had not gone and the trucks could not go," hauling supplies through gunfire, where "men dropped their loads and scattered; the women, undisturbed, plodded on in a long single file to the front."

Elsewhere, Etsumi Tarihori in Okinawa spent nights in sleeping bag on a sidewalk outside the entrance to the US consulate. She engaged in a "round-the-clock protest" of the US war in Iraq and has (had) led to the Okinawan women's peace movement for years. She had been there for 76 weeks as a protest against US military presence on Okinawa as she was inspired by an incident when US soldier raped a Japanese women.

Another interesting and similar case can be found in Bougainville conflict. The conflict started in 1988 because of the tension between the people of Bougainville and Papua New Guinea (PNG). Much

attention has been given to the role of women in bringing peace to Bougainville, from the grassroots community level to the regional, national and international levels. Even during the most intense violence in the early 1990s, women launched peace activities at village level, including going into the bush to talk to young fighters and to persuade them to return to their homes. Later, women organized peace demonstrations, conferences and meetings.

The Bougainville Inter-Church Women's Forum, which was held over a week in August 1996 in Arawa, became a turning point in the conflict. About 700 women attending from all over Bougainville. The meeting called for peace talks between the PNG government, the BRA (Bougainville Revolutionary Army) and the BRF (Bougainville Resistance Force). One of the key element here, that I would like all of us to acknowledge, is that Bougainville has matrilineal traditions. It means that women are arguably considered as the mothers of the group and owners of the land and culture. This is why, not only can we avoid the pushback from naturalistic argument, but we can also tell the greatness of women's involvement in specific manner to specific group of people.

Many other women in other places played different roles during wartime, like women at Greenham Common or the Women's International League for Peace and Freedom. Other women supported war efforts from home,

much like the American World War II icon Rosie the Riveter. Others provided logistical support and health care in battle-torn areas, comparable to Clara Barton and the Red Cross. Other women, like previously mentioned were soldiers, members of rebel groups, or warlords themselves. What these women have in common, is that they have a lot going against them. These women from various backgrounds want to have their voice heard. Any means necessary to make them have the capacity to speak on their own behalf, should be not just my concern, nor yours, but all of us.

**WOMEN-FRIENDLY POLICY IN WARTIME AND RECONSTRUCTION**

The issue of women empowerment poses a very important question to any of us concerned about that. The most important question to answer is "how to best effectively do that?" especially in the context of militarized situation.

It is critical to understand spectrum of tactics and strategies applicable in order to accurately pinpoint comprehensive approach to the issue. Women have been largely unacknowledged when they contribute in war, something that we should tell as inspirational stories so that people recognize their contribution.

There is often disconnect between policies either during conflict or during post-conflict reconstruction because the needs of women remain not taken into consideration. This is to say that women are being integrated into a world that remains defined and shaped by men's interests and needs. We can see this disconnect when the gendered of women not catered to, like in cases of the UN sanctions regime on Iraq. Iraqi women (especially in the earlier years) had difficulty finding ways to buy prenatal vitamins and baby milk on the black market because they were not seen as basic needs and exempted from the embargo. This is the kind of case that requires women's participation to enable our policies to support the needs and to represent the varying interests women have.



Sumber: shutterstock

# ASEAN TWIPLOMACY DURING THE PANDEMIC

Anak Agung Mia Intentilia, University of National Education Bali

**"Nice to meet you, virtually"**

This Greeting Is Becoming More And More Familiar, As We Are All In This Position When In-Person Meetings Have Been 'Replaced' With Virtual Or Online Meetings That Allow Us To Minimize Actual Physical Contact, In Order To Support Social Distancing And To Reduce The Spread Of Covid-19.

As A Response To This Pandemic, Many Adjustments Have Been Made. People Must Follow The Standard Health Protocol Such As Wearing Masks, Staying At Home, And Going Out Only If It Is Absolutely Necessary. Hence, The Use Of Information And Communication Technology (Ict) Is Highly Crucial To Help Us To Carry On With Business As Usual. People Access The Internet More To Get Information And Connect With Others Through Their Social Media Accounts. Businesses, Academic Institutions, And

Governments Utilize Social Media To Keep Their Engagement With Involved Parties. Then, How About Asean? Does This Regional Organization Utilize Its Digital Presences As Part Of Its Diplomacy To The Public?

Bjola (2015), in his article Making Sense of Digital Diplomacy, mentions that as broadly defined, digital diplomacy is the use of social media for diplomatic purposes, which also includes public diplomacy. Therefore, in this context, the purpose of digital diplomacy is to



Sumber: shutterstock



Sumber: Shutterstock



raise public awareness of the existence and programs of ASEAN by using social media to get public engagement and support. This article aims to observe the messages presented by ASEAN's official Twitter. The use of Twitter as a platform to conduct public diplomacy is often referred to as "Twitter Diplomacy" or "Twiplomacy". As per 29 July 2020, the official Twitter account of ASEAN, @asean, has 116.600 followers with 8.858 tweets. From March until July 2020, this article observes that ASEAN Twiplomacy highlights three important topics: presenting COVID-19 information; engaging with the youth; and promoting ASEAN agendas.

**PRESENTING COVID-19 INFORMATION**

In regard to the COVID-19 issues, this account tweeted general information, such as the importance of social distancing and wearing masks, along with a reminder to avoid panic buying. In this context, the Twitter account addresses its followers as "ASEAN citizens". This means that ASEAN has attempted to communicate with the public and showed a sense of belonging by calling the citizens of the 10 member states collectively as "ASEAN citizens". Moreover, this account portrayed the efforts of ASEAN to overcome this pandemic. ASEAN also

informed the public that it has actively utilized all platforms as efforts to keep the community resilient against the COVID-19 pandemic. Up until July 2020, this account has attempted to regularly present the updates of ASEAN efforts, new cases, and travel advisories.

ASEAN projected a message that shows its spirit of togetherness and support to each member states by agreeing to the so-called "regional collective response" to the COVID-19. This attempt illustrates that ASEAN emphasizes the idea of "unity" at the forefront. Another interesting thing is when this Twitter account turned the issue of COVID-19 into encouraging a healthier lifestyle, such as to actively exercise, as well as to call for a storytelling video contest that emphasizes people's experience in fighting COVID-19. These two examples depict that ASEAN grabs these circumstances as an opportunity to invite the public to be more involved in ASEAN's activities.

Other than the issue of COVID-19 pandemic, the promotion of scholarship and professional opportunities, as well as publication of high-achieving ASEAN youth are also the highlights of ASEAN Twiplomacy. ASEAN young professionals can access information about some

interesting opportunities, such as ASEAN-China Young Leadership, ASEAN Data Science Explorers, ASEAN Prize, ASEAN Foundation Model ASEAN Meeting, ASEAN SME Academy, and other scholarship opportunities. It shows that ASEAN utilizes its Twitter account to connect more to young people, as their generation uses social media the most. Presenting these valuable opportunities does not simply just giving them information, but also to prove that ASEAN has implemented its commitment to support education and youth empowerment through various programs.

In addition, ASEAN featured its top achieving youth, such as Indonesian swimming athlete I Gede Siman Sudartawa, Bruneian artist Osveanne Osman, and modern solo singer from Cambodia, Pich Sophea, and called them as "ASEAN Pride". It shows the gesture of appreciation towards their achievements and talents. Moreover, ASEAN has conducted a webinar to enable youth to support ASEAN Vision 2025 and conducted a virtual talk with the theme "ASEAN Youth-led Social Impact". In the context of COVID-19, there was also an interactive webinar with the topic of "ASEAN Youth and COVID-19: Success Stories and the Way Forward". These efforts illustrate that ASEAN has focused on the involvement of youth by inviting them to participate in different dialogues and by listening to their perspectives. It creates a positive image that ASEAN is trying to move closer to the heart of young people.

**PROMOTING ASEAN AGENDAS**

Despite facing some changes and adjustments from in-person to online meetings, ASEAN proves that its agendas beyond the COVID-19 issues are still considered prominent. The information portrayed on Twitter also includes several ASEAN agendas, such as promoting virtual tours and the digitalization process, informing the marketing strategy developed by ASEAN National Tourism Organization, participating in the international Earth Day, showing commitment in combating marine debris, and managing the ASEAN sustainable urbanization strategy. ASEAN

has conducted ASEAN Special Summit on COVID-19, which did not only discuss the health sector, but also all pillars of cooperation. Albeit the limitation of presenting political-security issues on Twitter, ASEAN shows its interest in the economic sectors, such as ensuring the supply and demands of products during this situation.

The account promotes the ASEAN Culture of Prevention, which covers various topics, such as a culture of peace and intercultural understanding; a culture of respect for all; a culture of good governance at all levels; a culture of resilience & care for the environment; a culture of a healthy lifestyle; and a culture supporting the value of moderation.

Another topic like ASEAN gender outlook was also being discussed through

online consultation. Furthermore, this organization emphasizes the importance of ASEAN identity to make it relevant to people in the grassroots by showing the statement from Indonesia's Foreign Minister, Retno Marsudi. ASEAN also mentions the chairmanship of Vietnam and appreciates its contribution to this organization.

In addition, the Twiplomacy has promoted that ASEAN agendas do not only involve its member states but also external partners, for instance when ASEAN participated in International Day for Multilateralism and Diplomacy for Peace. This proves that ASEAN, as a regional organization, shows that despite the social distancing and travel restrictions, its operation still runs smoothly through video conference to cover its various comprehensive agendas, including but not limited to COVID-19.

To conclude, ASEAN has conducted its Twiplomacy by utilizing its official Twitter account to present information to people. However, there are limitations in the context of engagement with the public. The numbers of retweets, likes, and comments from the followers are still considered very low. It means that the information flow is only one-sided from ASEAN to people, without so much response or feedback. ASEAN might want to consider a more effective digital strategy to connect to people, to make them become more attracted to ASEAN tweets and programs. The COVID-19 pandemic can be seen as an opportunity to improve ASEAN Twiplomacy, to provide more content to boost two-way engagement, so that the idea of making ASEAN as a people-centered organization can be achieved better.



Sumber: Shutterstock

# Pojok Bahasa BAHASA FILIPINA

Ahmad Fahriza, Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN



## No. FILIPINA

1. **Mabuhay**
2. **Kumusta ?**
3. **Ako si "nama"**
4. **Ikinagagalak kong makilala ka**
5. **Anong Pangalan Mo?**
6. **Mabuti ako, ikaw ?**
7. **Galing ako sa "lokasi"**
8. **(Maraming) Salamat**
9. **Walang anuman (po)**
10. **Maligayang Pagdating**
11. **Magandang Umaga**
12. **Magandang Tanghali**
13. **Magandang Hapon**
14. **Magandang Gabi**
15. **Paalam**
16. **Oo**
17. **Hindi**
18. **Hindi ko alam**
19. **Sige**
20. **Sandali lang (po)**
21. **Paumanhin (po)**
22. **Hindi ko maintindihan**
23. **Alam mo bakung saan ang "objek" ?**
24. **Nakatira ako sa "lokasi"**
25. **Nasa bahay ako**
26. **Tama ka**
27. **Wag mag-alala**
28. **Patawad**
29. **Hindi ako makapagsalita ng Tagalog**
30. **Isa**
31. **Dalawa**
32. **Tatlo**
33. **Apat**
34. **Lima**
35. **Anim**
36. **Pito**
37. **Walo**
38. **Siyam**



## INDONESIA

- |                                      |
|--------------------------------------|
| Selamat (salam sambutan dalam acara) |
| Hai / bagaimana kabarmu ?            |
| Saya "nama"                          |
| Senang bertemu dengan mu             |
| Siapa namamu ?                       |
| Saya baik-baik saja, kamu ?          |
| Saya berasal dari "asal"             |
| Terima kasih (formal)                |
| Sama-sama (formal)                   |
| Selamat datang                       |
| Selamat Pagi                         |
| Selamat Siang                        |
| Selamat Sore                         |
| Selamat Malam                        |
| Selamat tinggal                      |
| Ya                                   |
| Tidak                                |
| Saya tidak tahu                      |
| Oke                                  |
| Tunggu sebentar (formal)             |
| Permisi (formal)                     |
| Saya tidak mengerti                  |
| Apakah kamu tahu dimana "objek" ?    |
| Saya tinggal di "lokasi"             |
| Saya sedang dirumah                  |
| Kamu benar                           |
| Jangan khawatir                      |
| Maaf                                 |
| Saya tidak bisa bahasa tagalog       |
| Satu                                 |
| Dua                                  |
| Tiga                                 |
| Empat                                |
| Lima                                 |
| Enam                                 |
| Tujuh                                |
| Delapan                              |
| Sembilan                             |



- |  |                                    |
|--|------------------------------------|
| 39. <b>Sampu</b>                                     | Sepuluh                            |
| 40. <b>Labing-isa</b>                                | Sebelas                            |
| 41. <b>labindalawa</b>                               | Dua belas                          |
| 42. <b>Dalawampu</b>                                 | Dua Puluh                          |
| 43. <b>Siyamnapu</b>                                 | Sembilan Puluh                     |
| 44. <b>Siyampu't Siyam</b>                           | Sembilan puluh sembilan            |
| 45. <b>Isang daan</b>                                | Seratus                            |
| 46. <b>Magkano (po) ito ?</b>                        | Berapa harga barang ini? (formal)  |
| 47. <b>Isang daang piso (po)</b>                     | Harganya seratus peso (formal)     |
| 48. <b>May bawas po ?</b>                            | Apakah bisa lebih murah?           |
| 49. <b>Anong oras nas?</b>                           | Jam berapa sekarang?               |
| 50. <b>Nasaan (po) ang CR?</b>                       | Dimana kamar kecil ? (formal)      |
| 51. <b>Pwede bang makuha na ang bill ?</b>           | Bisa minta tagihannya ?            |
| 52. <b>Tulong !</b>                                  | Tolong !                           |
| 53. <b>Pamilya</b>                                   | Keluarga                           |
| 54. <b>Tatay</b>                                     | Ayah                               |
| 55. <b>Ina</b>                                       | Ibu                                |
| 56. <b>Ate</b>                                       | Kakak (perempuan)                  |
| 57. <b>Kuya</b>                                      | Kakak (laki-laki)                  |
| 58. <b>Asawa</b>                                     | Pasangan (Suami/istri)             |
| 59. <b>Anak na lalaki</b>                            | Anak laki-laki                     |
| 60. <b>Anak na babae</b>                             | Anak perempuan                     |
| 61. <b>Tiyo (Tito)</b>                               | Paman (lebih muda)                 |
| 62. <b>Lolo (Lola)</b>                               | Kakek (Nenek)                      |
| 63. <b>Miss na kita</b>                              | Aku kangen kamu                    |
| 64. <b>Mahal kita</b>                                | Aku cinta kamu                     |
| 65. <b>Galit ako sayo</b>                            | Aku benci kamu                     |
| 66. <b>Napakaganda mo</b>                            | Kamu cantik sekali                 |
| 67. <b>Napakagwapo mo</b>                            | Kamu tampan sekali                 |
| 68. <b>Ang ganda mo ngayon</b>                       | Kamu terlihat luar biasa hari ini  |
| 69. <b>Napaka galing mong magluto</b>                | Kamusangatpandaimemasak            |
| 70. <b>Ililibre akita</b>                            | Saya yang traktir kamu             |
| 71. <b>Ang Bait mo</b>                               | Kamu baik sekali                   |
| 72. <b>Maligayang kaarawan</b>                       | Selamat ulang tahun                |
| 73. <b>Gusto kong kumain</b>                         | Saya mau makan                     |
| 74. <b>Umorder ako ng kanin at pritong manok</b>     | Saya pesan nasi dan ayam goreng    |
| 75. <b>Umorder ako ng tubig</b>                      | Saya pesan air putih               |
| 76. <b>Gutom na ako</b>                              | Saya lapar                         |
| 77. <b>nauuhaw ako</b>                               | Saya haus                          |
| 78. <b>Busog na ako</b>                              | Saya kenyang                       |
| 79. <b>Ang bus bana ito ay papunta sa "tujuan" ?</b> | Apakah bus ini ke "tujuan" ?       |
| 80. <b>Gusto kong pumunta sa paliparan</b>           | Saya mau ke bandara                |
| 81. <b>Mahilig akong magaral ng Tagalog</b>          | Saya senang belajar bahasa tagalog |



# MENGENAL BUSANA TIGA KERAJAAN DI ASIA TENGGARA

Janita Jaya, Sekretariat Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN



Busana daerah dapat menjadi penanda kebesaran budaya. Di Asia Tenggara, misalnya, yang kaya akan budaya dan kearifan lokal, pola dan motif kain dapat menunjukkan status sosial dan kedudukan dalam masyarakat serta mengandung makna filosofis yang dianut masyarakat setempat.

**B**usana dalam kehidupan masyarakat tradisional juga merupakan wujud pelestarian nilai-nilai adat yang diturunkan dari para leluhur.

Dalam Majalah Masyarakat ASEAN edisi ini, kami memperkenalkan busana tradisional tiga negara kesultanan dan kerajaan di ASEAN, yaitu Brunei Darussalam, Thailand, dan Kamboja.

## BRUNEI DARUSSALAM

Seperti negara serumpunnya, Indonesia dan Malaysia, busana tradisional Brunei Darussalam berupa kebaya atau baju kurung dipadu dengan kain atau songket untuk wanita. Sedangkan untuk pria, berupa busana tradisional khas Melayu yaitu baju teluk belanga berleher tegak dengan celana panjang dan sarung yang dililitkan di pinggang sepanjang lutut. Pakaian nasional wanita Brunei Darussalam yang biasa dipakai dalam kegiatan sehari-hari adalah baju kurung, yang dipadu dengan kain songket.

Kain tenun tradisional merupakan khazanah budaya Melayu yang telah



diwariskan secara turun-temurun di Brunei Darussalam. Terdapat berbagai ragam hiasan dan motif kain tenun Brunei yang terinspirasi dari alam, kepercayaan, dan budaya setempat. Kain tenun, seperti kain songket yang dikenakan oleh wanita, umumnya berbahan katun yang dihias motif geometris dengan benang emas.

Kain songket Brunei kerap digunakan di kalangan istana. Kain songket yang dikenakan oleh keluarga kerajaan umumnya bermotif air *muleh* dengan bentuk seperti rangkaian bunga yang melingkar. Pola ini menggambarkan bunga simpur, yang merupakan bunga nasional Brunei Darussalam. Motif ini melambangkan harmoni antara alam dan tradisi lokal. Bentuk kain songket bermotif air *muleh* biasanya berbentuk turus/vertikal, yang motifnya diisi dengan bentuk corak bunga simpur dan biasanya berbeda-beda warna

di tiap lajurnya. Hal ini menunjukkan alam dapat memberikan pengaruh dan inspirasi pada pembuatan kain dan motif tenun dalam budaya Melayu, termasuk di Brunei Darussalam.

Kalangan istana juga memberikan inspirasi dalam pembuatan ragam motif kain tenun. Legenda tentang keagungan raja serta bangsawan menjadi simbol yang diadaptasikan dalam pembuatan kain tenun, seperti motif *tepi dasar Pengiran Muda Marak Berapi* dan *punca puncak mahligai*. Adapun beberapa jenis kain, seperti kain cipogot, dipakai khusus dalam kegiatan resmi dan prosesi khusus seperti pertemuan kerajaan maupun acara pernikahan. Motif tenun seringkali juga dihias dengan kaligrafi huruf jawi maupun alfabet dari petikan ayat-ayat Al-Qur'an. Tradisi ini menggambarkan budaya Brunei Darussalam yang erat kaitannya dengan kesultanan dan agama Islam.



Sumber: shutterstock



### THAILAND

Thailand adalah kerajaan di Asia Tenggara yang terkenal dengan kerajinan tekstil sutranya. Busana tradisional Thailand disebut dengan *chut thai*, yang berarti pakaian Thai. Pakaian *chut thai* untuk pria dapat berupa kain *chong kraben* atau celana, dipadu jaket *raj pattern* seperti beskap berwarna putih, dengan opsi kaus kaki panjang selutut dan sabai (selendang untuk penutup dada).

Jenis pakaian ini dikenal juga sebagai pakaian nasional Kerajaan Thailand, atau disebut *chut thai phra ratcha* niyom. Sedangkan, pakaian *chut thai* tradisional untuk wanita umumnya terdiri dari *pha nung* yang berupa kain panjang yang menutup hingga bagian bawah tubuh, atau *chong kraben* yaitu kain yang dililitkan menyerupai celana, dan atasan blus yang dipadu dengan kain sabai seperti selendang. Pakaian wanita Thailand, yang juga umum digunakan, dapat berupa kain *sinh*, kain sutra yang ditunen dengan motif-motif ornamen khas dari daerah-daerah di negara itu.

Pakaian nasional Kerajaan Thailand untuk wanita dikenal pertama kali di masa Raja Bhumbol Adulyadej (Raja Rama IX) dalam kunjungan ke Eropa dan Amerika Serikat pada 1960. Untuk keperluan kunjungan resmi kenegaraan, diciptakanlah delapan pakaian nasional Kerajaan Thailand untuk wanita, yang merupakan versi kontemporer dari pakaian tradisional, yaitu *Chut Thai Ruean Ton*, *Chitlada*, *Amarin*, *Borom Phiman*, *Chakkri*, *Dusit*, *Chakkraphat*, dan *Siwalai*. Dalam kunjungannya ke Eropa, Ratu Sirikit mengenakan pakaian *chut thai chitlada*. Pakaian nasional ini dapat dikenakan baik oleh keluarga kerajaan maupun masyarakat dalam acara resmi atau formal.

*Chut thai chitlada* adalah salah satu pakaian nasional Kerajaan Thailand yang terkenal. Ini adalah blus lengan panjang berbahan sutra yang dihias dengan lima kancing berornamen dan dipadu dengan kain tenun *sinh* panjang. Kekhasan dari pakaian ini adalah warna blusnya yang cerah beragam, ditambah dengan kain bermacam motif yang senada. Pakaian *chut thai chakri* juga



Sumber: shutterstock

merupakan busana formal elegan yang digunakan untuk kaum wanita, ditunen dengan teknik "yok", yang dikenakan dengan kain *sinh* dan kain selendang sabai yang menjuntai dari sisi bagian depan ke belakang. Umumnya pakaian tradisional Thailand dilengkapi dengan perhiasan emas, seperti anting-anting, kalung, serta ikat pinggang yang bertahatkan batu mulia dan permata.

### KAMBOJA

Sampot merupakan pakaian tradisional Kerajaan Kamboja yang telah dikenal semenjak masa Kerajaan Funan (abad ke-1 sampai ke-6 Masehi). Sampot adalah kain sejenis sarung yang dikenakan baik pria maupun wanita. Motif dari kain sampot pun beragam sesuai dengan daerah-daerah di Kamboja. Pakaian dengan bentuk serupa juga dapat ditemukan di Laos dan Thailand.

Pakaian daerah yang sering dijumpai di Kamboja adalah *Sampot Chang Kben*, yang bentuknya serupa dengan kain *chong kraben* dari Thailand. Kain ini biasa digunakan di kalangan masyarakat Kamboja dalam acara-acara khusus, baik dari kalangan menengah dan atas, yang membedakan pemakaiannya hanya jenis motif untuk laki-laki dan perempuan. Konon kain ini berasal dari India pada masa kerajaan Hindu masih berkuasa di wilayah Kamboja.

Pada masa ini juga, masa Kekaisaran Khmer, candi Angkor Wat awalnya dibangun untuk pemujaan Dewa Wisnu. Kain *sampot chang kben* ini dikenakan untuk memperingati kepahlawanan Hanuman yang merupakan pengikut setia dari Pangeran Rama dalam hikayat Ramayana, sehingga ketika mengenakan kain ini, pemakainya seringkali menjuntai kain bagian belakangnya seperti ekor monyet Hanuman.

Variasi lain dari kain sampot adalah *sampot hol*, yang lebih kasual dan untuk pemakaian sehari-hari. Kain *sampot hol* memiliki lebih dari 200 varian motif, serta umumnya terdapat lima jenis warna yang dominan yaitu kuning, merah, cokelat, biru dan hijau. Pola kain *sampot hol* umumnya berbentuk motif binatang, geometris atau bunga. Kain *sampot hol* digunakan seperti sarung yang dilipit, lipatannya lalu diletakkan di bagian depan, kemudian diikat dengan ikat pinggang.

Kamboja juga memiliki *scarf* tradisional bermotif geometris kotak-kotak yang biasa disebut krama. Kain ini digunakan dalam kegiatan sehari-hari, sebagai penutup kepala, selendang, maupun untuk menggendong anak-anak. Penggunaan kain krama adalah ciri yang membedakan busana Kamboja dari busana Thailand, Vietnam, dan Laos.



Sumber: shutterstock



Sumber: shutterstock

# DOKUMENTASI BANTUAN YANG DILAKUKAN PERWAKILAN RI NEGARA-NEGARA ASEAN DI MASA PANDEMI COVID-19



Pengiriman bantuan berupa 2 juta surgical mask dan face shield dari Yayasan Temasek Singapura ke Indonesia 1 yang difasilitasi KBRI Singapura.



Bantuan logistik untuk WNI yang dilakukan oleh KBRI Kuala Lumpur.



Pemulangan WNI ke Indonesia yang dilakukan KBRI Bangkok.



Bantuan logistik untuk WNI yang dilakukan oleh KBRI Kuala Lumpur.



Bantuan logistik untuk WNI yang dilakukan oleh KBRI Manila



Pengiriman bantuan berupa test kit dari Vietnam untuk Indonesia yang difasilitasi oleh KBRI Hanoi.



Repatriasi jamaah tabligh yang dilakukan KJRI Davao City



Bantuan logistik untuk WNI yang dilakukan oleh KJRI Johor Bahru.



Bantuan logistik untuk WNI yang dilakukan oleh KRI Songkhla.

# Apa Itu COVID-19

Covid-19 adalah penyakit dengan tingkat infeksi yang tinggi, disebabkan oleh jenis Coronavirus yang baru. Mayoritas orang yang terinfeksi Covid-19 akan mengalami penyakit pernapasan secara ringan atau sedang dan bisa sembuh tanpa memerlukan perawatan khusus. Namun orang tua dan orang yang mempunyai riwayat medis seperti gangguan pernapasan, diabetes, dan kanker dapat menjadi serius.

## CARA PENYEBARAN VIRUS

- Melalui udara dengan cara bersin dan batuk
- Bersentuhan dengan orang yang terinfeksi virus Corona
- Melakukan kontak fisik dengan objek atau permukaan benda yang terinfeksi

## GEJALA

- Demam
- Batuk/Bersin
- Kedinginan
- Sesak Napas
- Mual

## PROTOKOL KESEHATAN NEW NORMAL

Jangan lupa bawa dan gunakan barang ini!

- Masker
- Face shield
- Hand sanitizer
- Alat makan



## HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DI ERA NEW NORMAL

- Keluar rumah menggunakan masker
- Menjaga jarak aman
- Rajin mencuci tangan
- Hindari menyentuh wajah
- Membawa hand sanitizer
- Membawa perlengkapan pribadi
- Menghindari keramaian
- Mengonsumsi vitamin
- Penerapan etika batuk dan bersin
- Dianjurkan menggunakan face shield

# MAJALAH MASYARAKAT ASEAN GOES DIGITAL

Majalah Masyarakat ASEAN Hadir Dalam Format Digital yang Dapat Diakses Melalui:

## SITUS KEMENTERIAN

[www.kemlu.go.id](http://www.kemlu.go.id)

- Ketik "Majalah Masyarakat ASEAN" pada kolom cari atau search.
- Klik Edisi Majalah Masyarakat ASEAN yang ingin ada baca.

## SITUS SEKRETARIAT NASIONAL ASEAN-INDONESIA

<http://setnas-asean.id/>

- Cari menu "referensi" dan pilih "Majalah Masyarakat ASEAN".
- Klik Edisi Majalah Masyarakat ASEAN yang ingin ada baca.

## MEDIA SOSIAL



## APLIKASI GOOGLE PLAY



- Pilih menu Books dan ketik "Ditjen Kerjasama ASEAN" pada kolom pencarian.
- Klik Edisi Majalah Masyarakat ASEAN yang anda ingin baca.

